

NASIONALISME DI PERBATASAN: REKONSTRUKSI IDENTITAS KEBANGSAAN KOMUNITAS PERBATASAN DI KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT

Aris Munandar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional Jakarta
arismuda2407@ymail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang dinamika interaksi antara negara dan masyarakat dalam proses rekonstruksi identitas kebangsaan pada komunitas perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas-Kalimantan Barat, sejak Kemerdekaan sampai Era Reformasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode etnografi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa gagasan nasionalisme dan identitas kebangsaan tidak bersifat fiks dan final. Secara dinamis, dimaknai dan dikonstruksikan melalui negosiasi, kontestasi, dominasi, dan kompromi antara negara dan masyarakat lokal, dalam kurun waktu yang panjang, sejak kemerdekaan hingga era reformasi, dan dalam kerangka kepentingan politik, ekonomi, dan sosio-kultural.

Kata kunci: nasionalisme, identitas politik, identitas kultural, komunitas perbatasan

ABSTRACT

This study discusses the dynamics of the interaction between state and society in the reconstruction of national identity on the community of Indonesia-Malaysia border in Sambas District, West Kalimantan, since Independence until the Reform Era. The research approach is qualitative with the ethnographic methods. The results of the study explained that the idea of nationalism and national identities are not fixed and final. In a dynamic, interpreted and constructed through negotiation, contestation, domination, and a compromise between the state and local communities, in a long period of time, and within the framework of political, economic, and socio-cultural.

Keywords: *nationalism, political identity, cultural identity, border communit*

1. Pendahuluan

Proses terbentuknya negara-bangsa di Asia Tenggara adalah konsekuensi dari pembagian teritori wilayah di masa kolonial pada abad 19-20, ketika para penguasa kolonial membagi wilayah Asia Tenggara berdasarkan kepentingan ekonomi-politik mereka, tanpa melibatkan para subyek jajahan mereka. Faktor-faktor kultural, agama, linguistik, pola mobilitas, formasi-formasi hubungan sosial maupun jaringan perdagangan tradisional tidak menjadi dasar pertimbangan utama bagi penentuan batas negara. Akibatnya, batas-batas negara di Asia Tenggara tidak

berpotongan dengan batas-batas kultural secara *persis* (Munandar, 2011). Hal ini pula yang berlaku pada perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan. Batas teritorial yang memisahkan Indonesia dan Malaysia di pulau Kalimantan adalah warisan kolonial, sebagai hasil kesepakatan antara Inggris dan Belanda yang berkuasa di Borneo pada saat itu untuk berbagi wilayah kekuasaan di antara mereka.

Munculnya negara-bangsa sebagai realitas politik, menyebabkan masyarakat di kedua sisi batas negara tersebut 'dipaksa' untuk berafiliasi dan mengidentifikasi diri pada identitas kebangsaan (politik) yang berbeda. Dilihat dari sudut kepentingan politik, wilayah perbatasan dianggap sebagai titik persinggungan antara kepentingan kedaulatan nasional dan negara tetangga sehingga ditempatkan sebagai wilayah yang rawan, sebuah *frontier* yang harus dijaga dari ancaman luar. Akibatnya, mobilitas lintas negara yang kerap dilakukan warga komunitas di perbatasan, ditafsirkan sebagai gejala yang menyimpang dan dianggap sebagai indikasi lunturnya rasa nasionalisme.

Namun demikian, kehadiran negara dengan batas-batas teritorial sebagai realitas politik, tampaknya tidak serta merta menjadi 'fakta sosial' baru yang bisa menggantikan atau mengeliminasi norma-norma dan nilai-nilai kultural sebagai *pattern of behavior*, yang menjadi pedoman warga komunitas lokal di perbatasan dalam berperilaku dan menjalin hubungan sosial di antara mereka. Garis batas fisik negara tidak dapat menghapus realitas sosial-budaya yang sudah ada sebelumnya. Sampai saat sekarang, individu dan unit-unit sosial yang berada di antara garis batas tetap meneruskan irisan itu, terutama dalam hal migrasi penduduk, perdagangan, dan hubungan kekerabatan.

Menurut Lumenta (2011), orientasi ruang masyarakat perbatasan ke luar NKRI (Malaysia) bukanlah karena lunturnya rasa nasionalisme atau daya tarik negara tetangga, tetapi terbentuk karena formasi alam yang menentukan keberlangsungan hidup sebuah komunitas. Mobilitas manusia sering terbentuk karena rantai komoditas yang selalu mencari jalur terpendek dari daerah suplai ke pasar, terlepas apakah formasi alam ini 'patuh' pada teritorialitas negara atau tidak. Penelusuran sejarah proses terciptanya perbatasan formal antara Indonesia dan Malaysia membawa kita pada logika pragmatis di belakang kebijakan pemerintah kolonial Inggris dan Belanda. Ketika garis perbatasan ditetapkan melalui Konvensi London, Juni 1891, para perunding sadar bahwa garis yang mereka tetapkan masih bersifat tentatif.

Persoalan identitas komunitas perbatasan menjadi isu krusial dalam studi ini, khususnya terkait dengan etnisitas dan kebangsaan, yang secara politik maupun kultural melibatkan dua negara yang berbeda -- Indonesia dan Malaysia. Dalam konteks politik (*nation-state*), komunitas perbatasan merupakan bagian dari warga negara dengan identitas politik atau kebangsaan yang dianggap sudah tuntas dan *fixed*. Identitas tersebut membedakan dan memisahkannya dengan warga negara lain. Sedangkan secara kultural (*ethnicity*), terbentuknya negara-bangsa tidak berarti memisahkan batas kultural yang secara historis telah hadir sebelum batas politik terbentuk. Konsekuensinya, perbedaan kewarganegaraan tidak mencerminkan perberdaan etnik, identitas nasional tidak kongruen dengan identitas kultural. Kondisi ini terjadi karena komunitas etnis sebagai realitas sosial-budaya telah hadir jauh sebelum munculnya negara-bangsa. Implikasi lebih lanjut, kehadiran negara

sebagai realitas politik tidak dengan serta merta membatasi hubungan sosial, budaya, dan ekonomi yang sudah terbangun dalam kerangka hubungan etnisitas pada komunitas di perbatasan. Selain faktor historis dan sosial-kultural, dimensi ekonomi dan politik turut mewarnai identitas kultural dan kebangsaan mereka. Tak dapat dipungkiri, adanya ketimpangan yang tajam dalam dinamika pembangunan antara Sarawak dan Kalimantan Barat, menjadi faktor krusial yang dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan orientasi dan identifikasi sosial penduduk di perbatasan.

Sehubungan dengan itu, studi ini bermaksud memahami dan memaknai identitas kebangsaan komunitas lokal perbatasan di Kabupaten Sambas-Kalimantan Barat, sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi, dalam kerangka relasi antara kepentingan kultural (*cultural interests*) dengan kepentingan politik (*political interests*). Bagaimana gagasan nasionalisme dan identitas kebangsaan dikonstruksikan dan direkonstruksikan di perbatasan? Bagaimanakah interaksi antara negara dan masyarakat dalam proses rekonstruksi nasionalisme di perbatasan sejak kemerdekaan hingga era reformasi?

2. Metode Penelitian

Fokus penelitian ini lebih menekankan pada proses sehingga pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode etnografi. Peneliti berusaha memahami proses rekonstruksi identitas di daerah perbatasan, yang menitikberatkan pada interaksi antara negara (kebangsaan) dengan komunitas lokal (etnisitas). Bagaimana eksistensi negara dengan berbagai kebijakan dan programnya hadir di perbatasan, serta berinteraksi dengan komunitas lokal yang ada di dalamnya, sehingga memungkinkan terjadinya kerjasama dan negosiasi, yang pada gilirannya mampu mendekonstruksikan dan merekonstruksikan tatanan sosial bersama.

Di samping itu, penelitian ini juga mengeksplorasi dan mengamati relasi-relasi ekonomi dan kultural antar komunitas lintas batas yang memungkinkan terbentuknya identitas bersama sebagai suatu kesatuan komunitas etnik, yang tumbuh dan berkembang di atas dua wilayah negara yang berbeda. Fokus pengamatan dilakukan pada ruang interaksi yang potensial membentuk makna identitas. Ruang publik ini direpresentasikan di dalam pasar, institusi pendidikan (sekolah), institusi kesehatan, dan institusi pelayanan publik lainnya, yang mereprestasikan kebijakan dan program negara (*nation building*) dan dinamika internal komunitas perbatasan.

Dalam proses penelitian ini, peneliti memposisikan diri sebagai bagian dari kehidupan masyarakat yang aktif mengamati, mendengar, merasakan, memikirkan, dan berdialog dengan sejumlah narasumber berkenaan dengan realitas hidup di perbatasan. Kemudian, merespon, mencatat, merekam, dan memotret peristiwa yang berlangsung di lapangan. Dalam situasi tertentu, peneliti juga terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, sebagai media untuk bisa memasuki kehidupan masyarakat secara lebih mendalam.

3. Rekonstruksi Identitas Kebangsaan dalam Perspektif Teoretik

Giddens (2003:44) mengemukakan bahwa identitas sosial terbentuk karena kesadaran individu sebagai anggota suatu kelompok sosial, yang di dalamnya

mencakup nilai-nilai dan emosi-emosi penting yang melekat dalam diri individu sebagai anggotanya. Identitas sosial berasosiasi dengan hak-hak normatif, kewajiban, sanksi, yang pada kolektivitas tertentu, membentuk peran. Pemakaian tanda-tanda yang terstandarisasi, khususnya yang terkait dengan atribut badaniah umur dan gender, merupakan hal yang fundamental di semua masyarakat, sekalipun ada begitu banyak variasi lintas budaya yang dapat dicatat. Dengan demikian, Identitas sosial bukan warisan biologis melainkan dikonstruksikan dan direkonstruksikan melalui interaksi sosial di dalam masyarakat.

Menurut Castells (2010:4), konstruksi identitas menggunakan bangunan material dari sejarah, geografi, biologi, produksi dan reproduksi institusi, memori kolektif dan fantasi pribadi, aparat kekuasaan, dan ajaran agama. Sehubungan dengan itu, ada tiga bentuk dan asal-usul bangunan identitas: identitas legitimasi (*legitimizing identity*); diperkenalkan oleh institusi masyarakat yang dominan untuk memperluas dan merasionalisasikan dominasi mereka menghadapi aktor sosial. Identitas resisten (*resistance identity*); dikembangkan oleh para aktor yang berada dalam posisi terstigmatisasi oleh logika dominasi, sehingga pertahanan dan kelangsungan hidup mereka didasarkan atas prinsip-prinsip yang berbeda, atau berlawanan dengan mereka yang menyebarkan institusi masyarakat. Identitas proyek (*project identity*); adalah identitas baru yang dibangun oleh para aktor sosial atas dasar material budaya yang tersedia pada mereka untuk mengubah posisi mereka dalam masyarakat dan mentransformasikan struktur sosial secara keseluruhan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa identitas sosial terbentuk melalui proses sosial yang dinamis dan dialektis, melibatkan negosiasi dan kontestasi di antara para pelaku dengan berbagai struktur atau kekuatan sosial yang muncul di dalam masyarakat, atau dengan kata lain, konstruksi identitas merupakan produk dari proses negosiasi aktor dengan situasi sosial atau kekuatan eksternal yang saling berkontestasi. Sebagaimana dikemukakan Giddens (2004:37) bahwa dalam masyarakat modern individu harus membentuk dan membentuk kembali dirinya agar mampu menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Karena kondisi-kondisi baru secara konstan muncul di sekitar individu yang harus dijadikan masuk akal. Individu harus mengelola dan melekatkan makna kepada dunia yang secara inheren tidak stabil.

Dalam konteks komunitas di perbatasan, pemahaman mengenai identitas menjadi menarik dan penting, terutama terkait dengan kebangsaan sebagai perwujudan dari kedaulatan negara-bangsa. Identitas kebangsaan menjadi ikatan politik primer dan loyalitas pokok dari anggota-anggotanya. Oleh karena itu, identitas lainnya seperti etnis, agama, daerah, keluarga, kelas dan gender, harus tunduk pada kesetiaan utama warga negara terhadap negara-bangsanya. Pertanyaannya adalah sejauhmana kebangsaan menjadi identitas kolektif yang dapat memberi makna terhadap pikiran, perasaan, dan tindakan bagi masyarakat di perbatasan? Di tengah realitas keseharian mereka yang dihadapkan pada praktek sosio-kultural, ekonomi, dan politik yang dikonstruksikan oleh kekuatan lokal, nasional, maupun global. Bagaimana kontestasi antara kekuatan tersebut direspons dan dimaknai oleh masyarakat, yang kemudian membentuk identitas kebangsaan atau nasionalisme mereka?

Ernest Gellner (1983:57), salah satu tokoh teori modern, melihat kebangsaan sebagai sesuatu yang cair dan dikonstruksikan oleh kepentingan ekonomi dan politik. Industrialisasi dan kapitalisme berada di belakang kemunculan nasionalisme dan bangsa. Bangsa adalah produk dan konsekuensi transisi masyarakat dari agraris ke industrial. Industrialisasi mensyaratkan dan membawa serta bentuk baru pengorganisasian masyarakat yang bersandar pada penyeragaman kultur. Oleh karena itu, bagi Gellner, bangsa adalah masyarakat dengan budaya tinggi (*high culture*) yang ditanamkan secara khusus, terstandarisasi, berbasis pendidikan, dan budaya literasi. melalui sarana pendidikan yang tersentralisasi "*low culture*" ditransformasikan menjadi "*high culture*". Sistem pendidikan ini menghapus perbedaan budaya regional dan mencetak penduduk ke dalam komunitas nasional yang sama. Dengan demikian, bangsa, nasionalisme dan negara hanyalah konsekuensi dari gerak industrialisasi. Karena itu, gagasan bangsa dan nasionalisme menyimpan agenda instrumental-manipulatif. Sementara itu, negara merupakan penyangga dan penjaga agenda instrumental-manipulatif tersebut.

Berbeda dengan Gellner, Anderson mendefinisikan bangsa sebagai berikut:
...the nation: it is an imagined political community – and imagined as both inherently limited and sovereign. It is imagined because the members of even the smallest nation will never know most of their fellow-members, meet them, or even hear of them, yet in the minds of each lives the image of their communion (2006:6).

Lebih lanjut, Anderson menjelaskan bahwa kemunculan bangsa dan nasionalisme merupakan instrumen integrasi sosial-budaya baru dalam masyarakat yang telah hancur oleh industrialisasi yang cepat, modernisasi dan kemajuan dalam teknologi. Transisi dari pra-modern menuju masyarakat modern ditandai oleh proses sekularisasi umum, standarisasi konsep waktu dan penemuan cetak komersial. Proses tersebut membuat nasionalisme menjadi mungkin. Proses pertama telah mentransfer loyalitas komunitas religius menjadi komunitas yang ditakdirkan, yaitu bangsa. Proses kedua telah membuka ruang imajinasi dalam suatu homogenitas, di mana seorang individu bisa mengidentifikasi dirinya dengan massa yang tidak dikenal dari bangsa yang sama. Munculnya *print-capitalism*, khususnya buku-buku dan surat kabar, telah menciptakan standarisasi bahasa dan menawarkan satu gambaran dunia yang berakar jelas dalam kehidupan sehari-hari. Proses-proses tersebut telah berhasil menciptakan bangsa, yaitu suatu komunitas politis yang dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren dan berkedaulatan (Anderson, 2006:44-45).

Sementara itu, Smith (1991:16) mendefinisikan bangsa sebagai penamaan populasi manusia yang berbagi wilayah sejarah, mitos dan memori sejarah bersama, massa, budaya publik, ekonomi bersama dan hak-hak hukum bersama, serta tugas-tugas untuk seluruh anggotanya. Oleh karena itu, bangsa sebagai komunitas yang terbentuk atas dasar kesamaan mitos dan memori, sama halnya dengan etnik yang juga merupakan komunitas teritorial. Namun, dalam kasus komunitas etnik hubungan dengan wilayah, bisa hanya merupakan historis dan simbolik. Sedangkan dalam kasus bangsa, itu bersifat fisik dan aktual, negara memiliki wilayah. Dengan

kata lain, bangsa selalu memerlukan elemen etnik dan bangsa tidak dapat dipahami tanpa mitos dan memori bersama dari wilayah teritorial. Lebih lanjut, Smith mendefinisikan nasionalisme sebagai doktrin tentang bangsa, bukan negara. Meskipun dalam prakteknya, sebuah bangsa yang bebas seringkali membutuhkan negara sendiri untuk melindungi dan memelihara budaya, tetapi hal ini bukan merupakan syarat mutlak (Smith, 1991:17).

Castells (2010:30) menanggapi secara kritis teori-teori nasionalisme di atas, menurutnya tidak cocok dengan praktik kontemporer dewasa ini. Berkembangnya nasionalisme pada milenium ini justru ditandai oleh melemahnya negara-bangsa yang ada, sehingga teori-teori sosial yang mengasimilasikan bangsa dan nasionalisme dalam konstruksi negara-bangsa modern adalah tidak relevan. Nasionalisme dan bangsa memiliki kehidupannya sendiri, independen dari kenegaraan, meskipun tertanam dalam konstruksi budaya dan proyek politik. Ada empat poin analitis utama yang perlu ditekankan untuk membahas nasionalisme kontemporer berkaitan dengan teori-teori nasionalisme. Pertama, nasionalisme kontemporer mungkin atau tidak mungkin berorientasi pada pembangunan negara-bangsa berdaulat, dengan demikian, bangsa secara historis dan analitis merupakan entitas yang independen dari negara. Kedua, bangsa dan negara-bangsa, secara historis tidak terbatas pada negara-bangsa modern sebagaimana dibentuk di Eropa dalam dua ratus tahun setelah Revolusi Perancis. Pengalaman politik saat ini tampaknya menolak gagasan bahwa nasionalisme secara eksklusif terkait dengan periode pembentukan negara-bangsa modern, yang mencapai puncaknya pada abad kesembilan belas, direplikasi dalam proses dekolonisasi dari pertengahan abad kedua puluh oleh impor dari negara-bangsa Barat ke dalam Dunia Ketiga. Ketiga, nasionalisme belum tentu fenomena elit, dan pada kenyataannya, nasionalisme saat ini adalah lebih sering merupakan reaksi terhadap elit global. Pastinya, seperti dalam semua gerakan sosial, kepemimpinan cenderung lebih berpendidikan dan melek huruf (melek komputer) daripada massa populer yang memobilisasi sekitar tujuan nasionalis, tapi ini tidak mengurangi daya tarik dan pentingnya nasionalisme kepada manipulasi massa oleh para elite untuk kepentingan elit tersebut. Keempat, karena nasionalisme kontemporer lebih reaktif daripada proaktif, maka cenderung lebih bersifat kultural ketimbang politik, dan dengan demikian lebih berorientasi pada pertahanan budaya yang sudah terlembagakan daripada terhadap konstruksi atau pertahanan negara. Ketika lembaga-lembaga politik baru diciptakan atau diciptakan kembali, mereka merupakan parit pertahanan identitas, bukan meluncurkan *platform* kedaulatan politik.

Dalam konteks masyarakat perbatasan, Diener dan Hagen (2010:10) menjelaskan bahwa perbatasan suatu negara tidak dapat memisahkan proses modernisasi dalam suatu negara dengan negara tetangga tanpa memberi dampak nyata terhadap penduduk yang ada di dalamnya. Perbatasan merupakan daerah transisi dan pertemuan. Batas-batas negara dilihat sebagai garis pemisah antar negara, situs interaksi budaya, pertukaran, dan hibriditas. Oleh karena itu, populasi perbatasan sebagian besar dipengaruhi oleh dan berpartisipasi dalam interaksi lintas-perbatasan baik ekonomi, sosial, atau interaksi kultural. Interaksi transnasional terwujud dalam berbagai cara. Bagi penduduk perbatasan, interaksi seperti perdagangan lintas batas, penyelundupan, migrasi tenaga kerja, bersosialisasi, dan

mengunjungi teman-teman dan kerabat di sisi berlawanan adalah karakteristik utama dari kehidupan transnasional sehari-hari mereka. Selanjutnya, tingkat kesamaan etnis atau kultural yang tinggi antara orang-orang di perbatasan yang berdekatan memainkan peran penting untuk memahami strategi lokal perbatasan (Skeldon, 1999:3).

Dengan demikian, perbatasan bukan situs untuk membagi orang ke dalam ruang yang terpisah, identitas dan kelompok yang berlawanan, tetapi situs untuk interaksi antara individu dari berbagai macam latar belakang, hibridisasi, kreolisasi, dan negosiasi. Meskipun menawarkan kesempatan untuk pertukaran budaya, wilayah perbatasan juga sering menjadi situs pertentangan budaya (*cultural animosity*) dan pada akhirnya konflik militer. Perbatasan selalu merupakan domain kekuasaan yang diperebutkan di mana kelompok-kelompok lokal, nasional, dan internasional menegosiasikan hubungan subordinasi dan kontrol. Oleh karena itu, meskipun perbatasan internasional adalah struktur negara namun tidak berarti bahwa negara dapat menjamin keamanan perbatasan mereka dari pengaruh asing. Dalam banyak kasus, pemerintah pusat tidak mampu mengontrol wilayah perbatasan sehingga hubungan antara kekuasaan dan identitas di perbatasan serta antara perbatasan dan negara masing-masing menjadi problematik (Hasting dan Donand, 2010).

Menurut Ishikawa (2010:5), kekuatan politik dan budaya lokal di perbatasan dipengaruhi oleh kekuatan internasional dari negara-negara lain sehingga memberikan batas konfigurasi politik tertentu yang dapat membuat hubungan mereka dengan pemerintahnya sangat bermasalah. Kondisi ini dapat terjadi, karena batas negara adalah garis khayali (*notional lines*) pada peta dan di lapangan yang memberikan demarkasi yang tajam antara dua wilayah dan dua kedaulatan. Mereka juga terletak di jantung dari apa yang dapat disebut zona perbatasan, daerah di kedua sisi perbatasan di mana kedekatan tempat yang berbeda dalam hal-hal seperti mata uang, hukum, kewarganegaraan, dan harga komoditas memiliki pengaruh besar.

Realitas sosial di perbatasan menunjukkan adanya kontestasi ekonomi, politik, dan sosial-budaya antar masyarakat, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, sehingga memberi ruang bagi warga komunitas lokal untuk menegosiasikan dan mengkonstruksikan kembali identitas sosialnya sesuai dengan situasi yang dihadapi dan kalkulasi kepentingan tertentu. Dengan demikian, identitas sosial komunitas lokal di perbatasan akan dikonstruksikan secara terus menerus, serta dinamika situasi sosial yang berlangsung di daerah perbatasan akan dijadikan sebagai dasar rekonstruksi identitas sosial.

Terkait dengan konstruksi kebangsaan, Brown (2000:123) membedakan tiga model nasionalisme dengan asumsi dan visi yang berbeda: nasionalisme sipil, nasionalisme etnokultural, dan nasionalisme multikultural. Nasionalisme sipil menawarkan visi integrasi, yaitu terbentuknya komunitas warga negara yang sama; nasionalisme etnokultural menawarkan visi komunitas yang diikat oleh kepercayaan dalam kesamaan leluhur dan budaya etnik; dan nasionalisme multikultural menawarkan visi komunitas yang menghargai dan mendukung otonomi budaya dan kesamaan status dari komponen kelompok-kelompok etnik.

a. Nasionalisme Civic

Nasionalisme civic menawarkan visi dari sebuah komunitas kekerabatan warga yang sama dibentuk atas dasar kontrak, komitmen, loyalitas dan cinta. Individu-individu dari berbagai latar belakang etno-kultural dapat memasuki komunitas ini pada masa dewasa atau melalui migrasi, dengan melakukannya sendiri untuk loyal kepada lembaga-lembaga publik dan cara hidup dari lingkungan tempat tinggal mereka. Jadi, nasionalisme civic dapat mengakomodasi perbedaan etnokultural dalam bangsa selama negara tidak memandang etnis dalam institusi-institusi publik dan kebijakannya, dan selama individu diarahkan loyalitas politiknya untuk negara bukan untuk kelompok etnokultural mereka. Jadi, dalam model nasionalisme civic bangsa didefinisikan dalam hal komitmen bersama dan kebanggaan terhadap lembaga-lembaga publik negara dan masyarakat sipil, yang menghubungkan orang dengan wilayah yang mereka tempati. Bangsa menyatukan kesamaan budaya, cara hidup, karakter nasional, yang dimiliki oleh semua warga negara terlepas dari asal etnis.

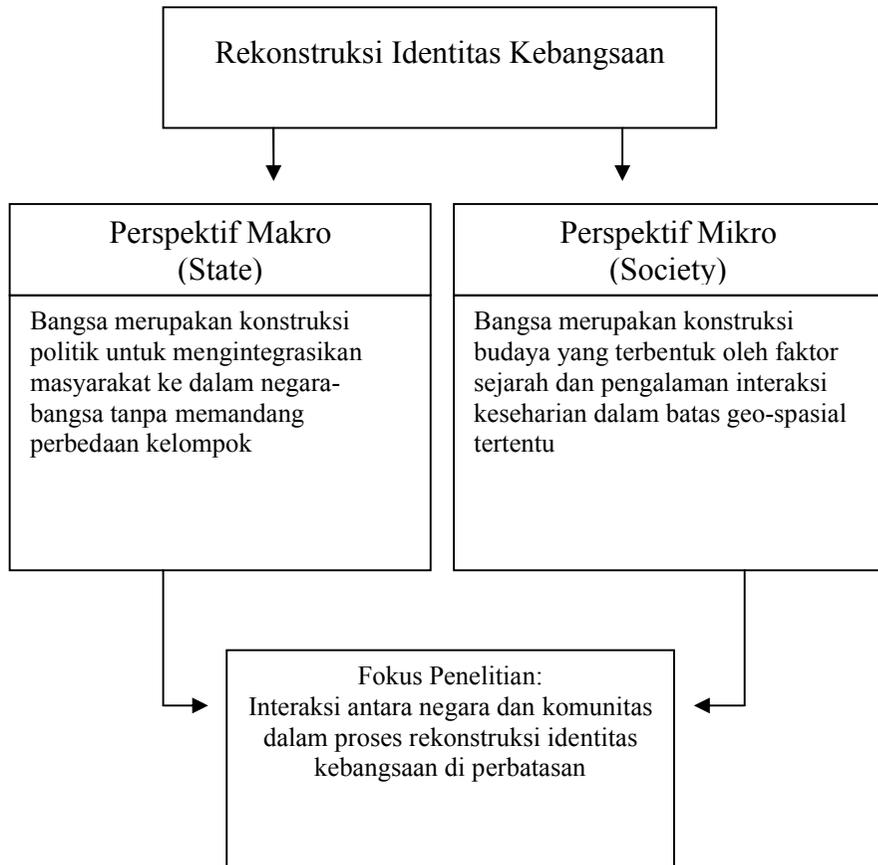
b. Nasionalisme Etnokultural

Nasionalisme etnokultural disebut juga sebagai nasionalisme etnis atau budaya, di mana bangsa digambarkan sebagai komunitas yang dipersatukan oleh kesamaan etnokultural dan anggotanya berasal dari nenek moyang yang sama (Brown, 2000:50). Secara spesifik, Connor (1994:91) menegaskan bahwa etno-nasionalisme adalah suatu gerakan sub-nasional untuk otonomi atau kemerdekaan yang diorganisasi menurut garis bahasa, etnis, religius, atau budaya. Etno-nasionalisme dapat dilihat sebagai suatu bentuk mobilisasi etnik untuk mendapat keuntungan politik dan ekonomi. Prinsip politik utama etno-nasionalisme adalah bahwa setiap kelompok etnis di dunia ini berhak atas penentuan nasib sendiri (*self-determination*). Hasil akhirnya bisa bervariasi; dari pemberian otonomi khusus di dalam negara yang sudah ada hingga ke negara berdaulat yang terpisah dari negara induk.

c. Nasionalisme Multikultural

Konsep multikulturalisme digunakan untuk merekam fakta bahwa semua masyarakat kontemporer berisi sejumlah kelompok budaya yang berbeda. Di sisi lain, istilah multikulturalisme juga digunakan untuk menunjukkan sudut pandang tentang sifat perbedaan budaya dan tentang bagaimana kita harus menanggapi mereka secara individu dan politik (Miller, 1995:140). Istilah ini juga kadang-kadang digunakan sebagai bentuk penolakan terhadap ide-ide identifikasi dengan negara-bangsa. Para pendukung multikulturalisme tidak melihat diri mereka sebagai nasionalis etnokultural yang tertutup, hanya mencari barikade politik dibalik yang mempertahankan integritas minoritas etnik mereka. Mereka mencari suatu komunitas nasional dimana komunitas-komunitas etnis yang beragam dapat berkembang, dan etnis minoritas yang kurang beruntung dapat dijamin hak-hak dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai perkembangan mereka secara penuh (Brown, 2000:124). Visi bangsa multikultural sebagai komunitas keadilan sosial ini diwujudkan sangat jelas dalam panggilan adanya negara-bangsa untuk mengakui dan mempromosikan hak-hak kolektif (*collective rights*) dari setiap kelompok etnis minoritas di dalam masyarakat untuk berbagai bentuk otonomi tertentu, alokasi sumber atau perwakilan politik (Kymlicka, 1995:6).

Secara skematik, rekonstruksi identitas kebangsaan dalam konteks penelitian ini dapat divisualisasikan dalam bagan berikut.



4. Rekonstruksi Kebangsaan Sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi

Rekonstruksi kebangsaan di perbatasan berlangsung secara berkesinambungan dan melalui proses sosial yang dinamis, di mana kehadiran negara yang direpresentasikan oleh seperangkat institusi, aparatus, infrastruktur, dan program-program pembangunannya, dinegosiasikan dan dikontestasikan dalam praktik sehari-hari masyarakat lokal sehingga eksistensi negara-bangsa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pikiran, perasaan, dan tindakan masyarakat di perbatasan. Dengan demikian, ada dua aspek yang saling terkait dari negara, yaitu negara sebagaimana terdapat pada praktek lokal sehari-hari dan negara sebagai sumber kekuasaan yang monolitik.

Analisis mengenai rekonstruksi kebangsaan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga kurun waktu pasca kemerdekaan Indonesia: Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. Klasifikasi ini sangat penting untuk melihat kronologi dinamika, dan perkembangan yang berlangsung dalam proses formasi negara-bangsa di perbatasan. Bagaimana negara hadir di perbatasan dengan

seperangkat institusi, aparatus, infrastruktur dan program-programnya, untuk menegosiasikan dan meng-kontestasi-kan eksistensinya sehingga menyatu dan menjadi bagian dari struktur kesadaran masyarakat yang ada di dalamnya.

4.1. Rekonstruksi Negara-Bangsa di Masa Orde Lama (1945 -1965)

Periode awal formasi negara dan nasionalisme Indonesia yang diinisiasi oleh negara, berlangsung sebagian besar tanpa disadari di perbatasan terpencil sampai awal 1960-an, ketika Federasi Malaysia masih dilindungi oleh bekas penjajahnya, Inggris (Jones, 2002; Subritzky, 2000). Pada masa Orde Lama, negara masih berada dalam masa transisional dari kekuasaan kolonial. Oleh karena itu, proyek pembangunan bangsa lebih memprioritaskan upaya mempertahankan batas-batas teritorial geopolitik dari intervensi negara tetangga (Inggris-Malaysia). Konsekuensinya, formasi negara-bangsa diproyeksikan dan dikonstruksikan melalui pendekatan militer yang bertujuan untuk mengantisipasi dan mempertahankan kedaulatan teritorial negara dari intervensi tersebut. Namun, di sisi lain, penekanan pada pertahanan teritorial telah mengabaikan keberadaan masyarakat yang ada di perbatasan, sehingga proses negosiasi yang diperlukan untuk membangun gagasan negara-bangsa dari bawah (*state formation from below*) tidak bekerja, karena luputnya kehadiran institusi dan aparatus negara sebagai mediator penyebaran nilai-nilai kebangsaan. Formasi negara-bangsa dan nasionalisme merupakan proyek politik yang dikonstruksikan oleh elit-elit nasional tanpa melibatkan masyarakat lokal di perbatasan.

Rekonstruksi negara-bangsa di perbatasan Kabupaten Sambas, dimulai dari peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1960-an. Meskipun wilayah ini tidak menjadi pusat konflik dan warga masyarakat yang ada di dalamnya tidak terlibat dalam peristiwa tersebut, tetapi mereka berada dalam wilayah teritorial geopolitik Indonesia di mana proses formasi negara tengah berlangsung. Namun demikian, hadirnya pasukan militer sebagai aparatus negara tidak menjadi bagian dari kepentingan masyarakat lokal, sehingga mereka tidak mau terlibat dalam konflik antar negara tersebut. Hal ini terjadi karena eksistensi negara-bangsa belum terkonstruksikan dalam peta kesadaran masyarakat di perbatasan, yang secara historis dan genealogis sudah berada di wilayah itu sebelum kehadiran negara. Mereka hidup sebagai komunitas kultural berbasis etnik Dayak dan menempati wilayah yang melampaui batas-batas geopolitik negara, sehingga gagasan negara merupakan sesuatu yang asing dan tidak menjadi bagian dari kepentingan kolektif yang harus diperjuangkan oleh mereka. Kehadiran negara tidak menciptakan makna apapun bagi masyarakat lokal, sehingga rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap negara-bangsa tidak terkonstruksikan dalam imajinasi masyarakat, yang berimplikasi pada terjadinya kesenjangan antara identitas politik sebagai warga negara Indonesia dengan identitas kolektif sebagai komunitas perbatasan (Dayak).

Tidak terkonstruksikannya gagasan kebangsaan dalam imajinasi, perasaan, dan praktik sosial masyarakat, sangat terkait dengan formasi negara-bangsa pada masa ini yang bersifat elitis, dimanipulasi dan dipolitisasi oleh kaum intelegensia untuk memobilisasi dukungan. Formasi negara-bangsa tidak dimulai dengan pendekatan persuasif yang memungkinkan ide-ide negara-bangsa dapat dinegosiasikan dan dikonstruksikan dari bawah melalui peran institusi pendidikan,

media massa, buku, dan masyarakat sipil (*civil society*), melainkan melalui pendekatan represif dengan mengerahkan pasukan tentara (aparatus politik) untuk mengokohkan dominasi negara di perbatasan. Implikasinya, nasionalisme komunitas perbatasan tidak berorientasi pada kepentingan negara-bangsa, melainkan lebih mencerminkan ikatan kultural yang berbasis etnik.

Fokus negara yang sangat terkonsentrasi pada pengamanan dan penguasaan wilayah, menyebabkan hak-hak masyarakat sebagai warga negara (*citizen rights*) untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan pelayanan publik lainnya, tidak diperhatikan oleh negara. Padahal, keberadaan pelayanan tersebut merupakan media yang sangat strategis untuk mengintegrasikan masyarakat dengan struktur nasional. Dengan ketiadaan pelayanan tersebut, masyarakat tumbuh sebagai suatu komunitas kultural yang terpisah dari negara dan berupaya memenuhi kebutuhannya secara mandiri (*self-sufficient*). Ketidakhadiran negara untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat semakin menguatkan identitas kolektif masyarakat perbatasan sebagai komunitas kultural berbasis etnik Dayak, yang keberadaannya melampaui batas geopolitik. Relasi-relasi sosial-kultural dan ekonomi terjalin di antara mereka dan terlepas dari kontrol negara. Relasi-relasi dan tatanan sosial yang terbangun di dalamnya menjadi satu kebutuhan dan keharusan sosial bagi mereka dalam rangka menjamin kesinambungan kehidupannya sebagai suatu sistem komunitas. Perdagangan tradisional, hubungan kerja, kekerabatan, perkawinan, upacara adat, dan sebagainya, berlangsung sebagai suatu kenyataan sosial masyarakat di perbatasan.

Ringkasnya, proses formasi negara pada masa ini berlangsung sebagai aktivitas politik pertahanan yang difokuskan pada penguasaan teritorial negara, tanpa memperhatikan penduduk yang ada di dalamnya. Dalam konteks ini, bagi masyarakat perbatasan, nasionalisme dipahami lebih sebagai suatu reaksi daripada proaksi dan cenderung bersifat kultural daripada politis, sehingga orientasinya lebih pada memertahankan kultur yang sudah ada dan terlembagakan bukan membentuk atau mempertahankan sebuah negara. Hal ini menyebabkan identitas kolektif sebagai komunitas perbatasan tidak terintegrasi dengan identitas politik (bangsa Indonesia), sehingga kebangsaan dan etnisitas merupakan dua entitas yang terpisah dan saling berkontestasi di perbatasan. Dalam situasi ini, warga perbatasan lebih mengidentifikasi dirinya sebagai komunitas kultural (etnik dayak) daripada komunitas politik (bangsa Indonesia atau Malaysia). Formasi bangsa dan nasionalisme di perbatasan tidak menunjukkan kontinuitas sebagaimana digambarkan oleh Smith (1991) bahwa eksistensi negara-bangsa berakar dalam komunitas kekerabatan alami pra-modern yang memiliki keasliannya sendiri, melainkan merupakan dua entitas yang terpisah dan bersifat independen.

4.2. Rekonstruksi Kebangsaan di Masa Orde Baru (1966 -1998)

Peralihan rezim pemerintahan kepada Orde Baru secara umum tidak membawa perubahan yang berarti dalam pengelolaan perbatasan. Kebijakan pengelolaan perbatasan masih bertumpu pada pendekatan keamanan dan menempatkan wilayah perbatasan sebagai “halaman belakang” negara, sehingga tidak menjadi prioritas pembangunan. Oleh karena itu, secara fisik-spasial maupun kondisi sosial-ekonomi masyarakatnya tidak menunjukkan perubahan yang

signifikan. Mereka masih tetap merupakan wilayah yang terisolir dari pusat negara dan dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pasar. Pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik bagi masyarakat perbatasan masih belum menjadi perhatian dan prioritas pemerintah Orde Baru. Meskipun, kekayaan sumber daya alam di perbatasan berupa hutan yang luas, terus dieksploitasi oleh negara melalui Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang dijalankan oleh pengusaha dan elit-elit militer. Pada masa ini, kehadiran negara di perbatasan masih merupakan proyek elit nasional yang dipaksakan melalui aparatusnya (terutama militer) dan tidak memberikan ruang yang memadai bagi partisipasi masyarakat sipil, yang memungkinkan gagasan kebangsaan tumbuh sebagai suatu bentuk kesadaran masyarakat.

Pada masa ini, pendekatan keamanan tidak diorientasikan pada upaya pertahanan kedaulatan negara dari intervensi negara lain, tetapi lebih diorientasikan pada pengendalian dan pengintegrasian masyarakat perbatasan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk menciptakan integrasi nasional tersebut, maka “pembangunan” dijadikan sebagai strategi utama dalam formasi negara-bangsa dan nasionalisme. Prinsip kunci dalam rezim Orde Baru adalah ide negara kesatuan yang kuat: Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal ini, militer memainkan peran yang dominan sebagai penegak utama persatuan nasional. Militer mengembangkan doktrin dwifungsi yang menekankan peran sebagai pengawal kedaulatan negara dan pengawas politik, ekonomi, dan ideologi negara. Di bawah Soeharto, militer bercokol dalam urusan sipil, dan mereka memiliki sejumlah kursi permanen di parlemen. Perwira militer juga memegang posisi teratas di semua tingkat pemerintahan, kabupaten, dan provinsi, dan memainkan peran kunci dalam perusahaan bisnis milik negara dan swasta. Misalnya sejak pertengahan 1960-an hampir semua gubernur dan bupati di Provinsi Kalimantan Barat, memiliki latar belakang militer (lihat Eilenberg, 2012).

Konsep negara sebagai suatu entitas terus diperkuat dan diperkaya melalui berbagai praktik, gambar, simbol, peta wilayah, pos perbatasan, paspor, upacara militer dan bendera. Hubungan antara negara dan masyarakat Indonesia pada masa Rezim Soeharto, mengambil pendekatan *state-centred*. Negara memaksakan kontrol dan kekuasaan dari atas pada masalah-masalah lokal. Otoritas negara secara luas menggunakan retorika negara secara lokal dalam melegitimasi berbagai tindak pemerintahan, tetapi juga sebagai dalih untuk tidak bertindak sama sekali. Pada saat yang sama, masyarakat setempat sering menggunakan retorika pembangunan negara untuk membenarkan tindakan kemajuan ekonomi melalui aktivitas ilegal. Untuk bekerja secara kreatif dan bermain dengan retorika dan simbol negara adalah praktek yang umum dan sering digunakan untuk keuntungan lokal.

Pada awal 1960-an, militer diberikan hak penuh atas hutan yang produktif dekat dengan perbatasan Sarawak dan Sabah, Malaysia, demi kepentingan politik serta keamanan. Tahun 1967, kesepakatan ini diformalkan oleh Departemen Kehutanan dengan memberikan pada PT Yamaker (Yayasan Maju Kerja), yaitu sebuah koperasi milik militer Indonesia, konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan luas 1 juta hektar di sepanjang perbatasan dengan Malaysia – 843.500 hektar di Kalimantan Barat dan 265.000 hektar di Kalimantan Timur. PT. Yamaker bukanlah satu-satunya pemain yang terlibat dalam pengelolaan hutan untuk kayu di

zona perbatasan. Beberapa konsesi HPH juga aktif disana dan sebagian besar konsesi tersebut berada di bawah pengelolaan atau dimiliki oleh militer (lihat Obidzinski, 2006). Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa pengabaian wilayah perbatasan dari prioritas pembangunan merupakan bagian dari perencanaan, karena dibalik ini, rezim Orde Baru dengan yayasan militer-nya melakukan eksploitasi hutan untuk kepentingan ekonomi dan politik mereka.

Sebagaimana yang terjadi pada masa Orde Lama, nasionalisme masyarakat perbatasan tidak mengalami pergeseran, bertumpu pada identitas kultural, bahkan menunjukkan kecenderungan yang lebih kuat sebagai akibat tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Identitas berbasis kultural semakin menemukan posisinya sebagai bentuk resistensi terhadap dominasi kekuasaan negara yang menindas dan memperlakukan masyarakat secara tidak adil.

Pembangunan nasional, yang menjadi kata kunci dalam proyek pembangunan bangsa (*nation building*) pada masa Orde Baru, hanya merupakan wacana ideologis (pembangunanisme) yang tidak terealisasikan dalam wujud yang nyata di perbatasan. Alih-alih membangun akses dan fasilitas infrastruktur yang dapat mendorong mobilitas sosial masyarakat perbatasan, pemerintah Orde Baru melakukan eksploitasi sumber daya alam dan hutan dengan mengatas-namakan pembangunan nasional, yang ironisnya tidak memperbaiki kondisi sosial dan perekonomian masyarakat lokal. Terbatasnya kesempatan dan akses terhadap sumber-sumber daya di perbatasan desa Sebunga, pada akhirnya semakin menguatkan praktik-praktik sosio-kultural dan ekonomi tradisional lintas batas, yang pada dasarnya sudah terjalin lama sebagai konsekuensi dari suatu sistem komunitas di perbatasan. Perdagangan ilegal lintas batas, pekerja migran ilegal, pembalakan liar, dan pelintas batas ilegal, merupakan aktivitas yang lazim berlangsung di perbatasan. Aktivitas ilegal ini semakin intensif ketika kondisi ekonomi Malaysia semakin berkembang dan menunjukkan kesenjangan yang tinggi dengan Indonesia, khususnya di perbatasan. Dengan alasan kesamaan kultural dan etnis, masyarakat di perbatasan memanfaatkan peluang-peluang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menjalin relasi-relasi kultural dan ekonomi dengan warga di Malaysia.

Alasan-alasan kultural menjadi argumen rasional bagi masyarakat perbatasan untuk melanggengkan relasi-relasi sosial dan ekonomi lintas batas, di tengah keterbatasan akses di dalam negeri. Mereka sebenarnya mengetahui bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan aturan negara, tetapi tindakan tersebut dilakukan semata-mata dalam rangka menjamin kelangsungan eksistensinya yang tidak terpenuhi oleh sistem yang ada (Indonesia). Dengan demikian, orientasi ekonomi dan kultural masyarakat perbatasan Indonesia ke Malaysia, bukan karena ketiadaan rasa nasionalisme dan alasan-alasan kesamaan etnik, tetapi lebih merupakan strategi bertahan hidup untuk menjamin kelangsungan eksistensi mereka.

Dengan demikian, formasi negara-bangsa berlangsung sebagai proses dominasi (*top down*) yang memberikan peran sentral pada aparat politik (militer dan hukum) dan tidak melibatkan masyarakat sipil. Implikasinya, negara dan masyarakat merupakan dua entitas yang terpisah dan saling berkontestasi. Pemerintah Orde Baru lebih memilih cara-cara represif untuk menyebarkan ideologi negara di perbatasan dan tidak berupaya melakukan pendekatan persuasif

melalui pemberdayaan masyarakat sipil yang dapat merekatkan dan memperkokoh ide-ide negara sebagai bentuk kesadaran tanpa kekerasan, atau hegemoni konsensual.

Perubahan drastis di tengah krisis ekonomi dan politik dan jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaan pada tahun 1998 dengan cepat mengubah dinamika politik lokal di perbatasan. Dalam upaya untuk mendistribusikan kekuasaan politik dan ekonomi yang lebih merata dan memberikan otoritas kembali ke kabupaten, pemerintah reformasi mulai menginisiasi program nasional desentralisasi. Otonomi daerah menjadi topik utama, dan undang-undang baru menghasilkan serangkaian reformasi yang memberikan peningkatan otonomi kabupaten lokal atas sektor pemerintah, seperti kehutanan. Salah satu tujuan awal dibalik penguatan otonomi daerah ini adalah untuk mengurangi gerakan separatis di daerah yang kaya sumber daya, yang sebelumnya terpinggirkan dan dengan demikian mencegah kemungkinan pecahnya negara.

4.3. Rekonstruksi Kebangsaan di Era Reformasi (1998- Sekarang)

Di era reformasi, pemerintah menunjukkan komitmen untuk membangun daerah perbatasan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat lokal, dengan memberikan landasan dan arah kebijakan pembangunan daerah yang memprioritaskan pembangunan kawasan perbatasan dengan menganut prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Melalui fasilitas dan infrastruktur fisik, negara mempromosikan dan menegosiasikan kepentingan ideologisnya kepada masyarakat. Relasi kekuasaan masih menandai hubungan antara negara dan masyarakat di perbatasan. Hadirnya institusi, aparatus dan program pembangunan menjadi sarana penting untuk menegosiasikan dan mengokohkan gagasan-gagasan kebangsaan. Dibangunnya sarana pendidikan, pelayanan kesehatan, fasilitas perekonomian, dan infrastruktur fisik, tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sebagai warga negara, tetapi sebagai sarana untuk mensosialisasikan ideologi negara kepada masyarakat. Negara melakukan internalisasi ideologis dengan membangun sistem dan institusi-institusi untuk dapat merekatkan atau memperkokoh hegemoninya. Mekanisme kelembagaan seperti sekolah, gereja, partai-partai politik, media massa, dan sebagainya merupakan 'tangan-tangan' kelompok yang berkuasa untuk menentukan ideologi yang mendominasi.

Peran sekolah sebagai media penanaman ideologi negara ditunjukkan secara tegas, khususnya pada tingkatan sekolah lanjutan. Adanya keterlibatan aparatus militer mengontrol pelaksanaan pendidikan melalui kegiatan ekstra kurikuler. Sekolah bekerjasama secara terprogram dengan aparat militer melakukan pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara. Penekanan yang berlebihan pada peran integrasi nasional, telah mengabaikan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat sebagai tujuan pokok pendidikan. Implikasinya, sekolah dibangun tanpa ditunjang oleh kelengkapan sarana belajar, kuantitas dan kualitas guru yang memadai. Dalam tataran ideologis, terbukanya akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih tinggi, di sisi lain mampu mengubah konsepsi masyarakat tentang negara-bangsa.

Dengan demikian, pendidikan merupakan instrumen yang sangat sentral untuk mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan. Sebagaimana dikemukakan Gellner (1983) bahwa bangsa adalah masyarakat dengan budaya tinggi (*high culture*) yang ditanamkan secara khusus, terstandarisasi, berbasis pendidikan, dan budaya literasi yang ditopang oleh personel spesialis dan dipelihara oleh institusi pembelajaran khusus, berdedikasi, dan profesional. Namun demikian, rendahnya kualitas pendidikan dan masih terbatasnya fasilitas penunjang perekonomian di perbatasan, belum mampu memberdayakan potensi masyarakat lokal, yang sebenarnya menjadi tujuan pokok dari otonomi daerah dan desentralisasi. Aspirasi dan partisipasi publik di perbatasan untuk menentukan tujuan dan prioritas kebutuhannya, belum terakomodasi secara signifikan dalam perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan wilayah perbatasan masih didominasi oleh kepentingan nasional, hal ini ditunjukkan dengan adanya pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada tahun 2010, yang bertanggung jawab mengelola dan mengkoordinasikan pembangunan wilayah perbatasan.

Semua temuan empiris di atas, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan perekonomian, serta infrastruktur pendukungnya, semakin menegaskan bahwa nasionalisme sangat terkait dengan pemenuhan hak-hak kolektif masyarakat (*citizen rights*) dalam bidang ekonomi, sosial dan politik, yang dalam kenyataannya masih belum terpenuhi secara signifikan di perbatasan. Namun demikian, kontribusi pendidikan hanya berpengaruh pada pengetahuan kognitif dan praktik-praktik kebangsaan secara formal. Dalam aspek yang paling mendasar, yaitu perasaan memiliki (*sense of belonging*) terhadap bangsa, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Padahal, perasaan memiliki terhadap bangsa merupakan salah satu makna penting nasionalisme. Identitas nasional tidak hanya dipresentasikan dalam imajinasi dan penggunaan simbol-simbol kebangsaan, seperti penggunaan bahasa, mata uang, pemilikan kartu tanda penduduk, tetapi yang sangat penting adalah identifikasi psikologis yang mengintegrasikan individu dan masyarakat dalam identitas nasional.

5. Simpulan

Perbedaan historis antara terbentuknya negara-bangsa sebagai entitas politik dengan keberadaan masyarakat sebagai entitas kultural, berimplikasi pada tidak adanya kesesuaian antara batas geo-politik dan geo-kultural di perbatasan. Keberadaan masyarakat sebagai entitas kultural yang mendahului lahirnya negara-bangsa, menjadi kendala bagi upaya pembangunan negara-bangsa yang dapat mengintegrasikan kepentingan politik dan kepentingan kultural dalam identitas nasional. Namun demikian, Identitas politik dan identitas kultural bukan kategori sosial yang permanen dan final, melainkan dikonstruksikan dan direkonstruksikan melalui serangkaian interaksi antara negara dan masyarakat secara berkesinambungan meliputi; negosiasi, kontestasi, dan bahkan dominasi, sehingga menciptakan konstruksi sosial identitas masyarakat yang khas.

Di masa Orde Lama, eksistensi negara-bangsa masih berada dalam masa transisional dari kekuasaan kolonial kepada bentuk baru negara Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan negara-bangsa di perbatasan diorientasikan untuk mempertahankan kedaulatan negara dari kemungkinan adanya intervensi negara

asing (Malaysia/Inggris). Formasi negara bersifat *top-down* dengan memberikan peran yang sangat besar terhadap institusi dan aparatus militer, sehingga gagasan negara menjadi sesuatu yang asing dan eksistensinya tidak diketahui oleh masyarakat, karena mereka tidak ikut terlibat dalam proses awal pembentukan negara tersebut. Implikasinya, negara dan masyarakat menjadi dua entitas yang terpisah dan tidak terintegrasi.

Pada masa Orde Baru, pendekatan pertahanan dan keamanan masih memegang peran utama dalam program pembangunan bangsa. Namun, fokusnya lebih diorientasikan pada pengendalian dan pengintegrasian masyarakat perbatasan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kebijakan pembangunan nasional yang sentralistik merupakan strategi pokok yang diterapkan pemerintah dalam program pembangunan bangsa dan nasionalisme yang terintegrasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara melakukan “militerisasi politik” dengan menerapkan kebijakan dwi-fungsi ABRI, yang memberikan peran kepada militer sebagai kekuatan pertahanan dan sosial-politik. Implikasinya, peran dan kehadiran militer di perbatasan sangat dominan untuk menanamkan dan mengkonstruksikan identitas kebangsaan dan nasionalisme kepada masyarakat perbatasan. Namun, dominasi negara melalui aparatus militer tersebut tidak disertai dengan penyediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan kolektif masyarakat sebagai warga negara (*citizen rights*), sehingga hak-hak mereka akan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sumber-sumber ekonomi termarginalkan, serta mereka terisolasi secara geografis dari negerinya sendiri. Implikasinya, pembangunan negara-bangsa dan nasionalisme hanya merupakan proyek elit yang tidak terkonstruksikan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan masyarakat. Keberadaan negara hanya diakui sebagai pemilik otoritas politik atas wilayah, tetapi tidak menjadi identitas kolektif yang penting bagi masyarakat.

Pada era Reformasi, desentralisasi dan otonomi daerah menjadi landasan pokok dalam menjalankan program pembangunan bangsa yang berbasis kekuatan lokal. Namun dalam implementasinya, kehadiran negara dengan seperangkat kebijakan, institusi, regulasi, dan pembangunan infrastruktur belum membawa perubahan kesejahteraan, khususnya dalam pemenuhan hak-hak kolektif masyarakat secara memadai. Meningkatnya pendidikan masyarakat dan terbukanya akses terhadap sektor pekerjaan modern berpengaruh signifikan terhadap persepsi dan partisipasi mereka atas program-program negara. Tetapi, belum mampu membangun nasionalisme masyarakat yang tercermin dari sikap keberpihakan atau rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap negara. Orientasi nasionalisme masyarakat lebih bersifat kultural daripada politik.

Ringkasnya, pembangunan negara-bangsa yang diinisiasi oleh negara sejak Kemerdekaan hingga era Reformasi, sangat difokuskan pada pembangunan nasionalisme civic, di mana bangsa didefinisikan dalam hal komitmen bersama dan kebanggaan terhadap lembaga-lembaga publik negara dan masyarakat sipil, yang menghubungkan orang dengan wilayah yang mereka tempati. Bangsa digambarkan sebagai bentuk kehidupan bersama yang dipersatukan oleh kesamaan budaya masyarakat, cara hidup, karakter nasional, yang dimiliki oleh semua warga negara terlepas dari asal etnis.

Namun, pendekatan nasionalisme civic sebagai model pembangunan negara-bangsa tidak bekerja optimal di perbatasan, karena dalam praktiknya, institusi-institusi publik dan aparatus negara yang bisa menghubungkan komunitas kultural dengan komunitas politik (negara) tidak hadir secara optimal di perbatasan. Pembangunan nasionalisme civic dijalankan secara koersif melalui kekuatan militer, sementara pendekatan kesejahteraan yang memprioritas pemenuhan hak-hak warga negara (*citizen rights*) dan pemenuhan hak-hak kolektif (*collective rights*) tidak terpenuhi secara memadai.

Program pembangunan bangsa dalam upaya mewujudkan kedaulatan negara di perbatasan tidak menghasilkan respon yang optimal dari masyarakat lokal, sebaliknya mereka mempertahankan identitas kultural lintas batasnya sebagai bentuk resistensi terhadap kebijakan negara yang dianggapnya tidak adil. Resistensi masyarakat ini, pada dasarnya bukan merupakan bentuk penolakan terhadap kehadiran negara, tetapi lebih merupakan protes terhadap perlakuan negara yang kurang memfasilitasi kebutuhan mereka.

Dengan demikian, upaya pengintegrasian masyarakat perbatasan dalam kerangka nasionalisme Indonesia tergantung pada sejauhmana negara mampu memfasilitasi hak-hak individu (*citizen rights*) dan hak-hak kolektif (*collective rights*) mereka, sehingga pada gilirannya identitas kebangsaan menjadi bagian penting dari kesadaran kolektif masyarakat yang berdampingan dengan identitas berbasis kultural. Perkembangan negara-bangsa modern pada hakekatnya dibangun di atas dua bentuk jalinan nasionalisme civic dan etnokultural, yang kemudian mengkristal dalam bentuk nasionalisme multikultural.

Daftar Pustaka

- Anderson, Benedict. *Imagined Communities*. Third Edition. London: Verso, 2006
- Brown, D. *Contemporary Nationalism: Civic, Ethnocultural & Multicultural Politics*. New York: Rotledge, 2000
- Castells, Manuel. *The Power of Identity*. Second Edition. United Kingdom: Wiley-Blackwell Ltd., 2010
- Diener, Alexander C. and Joshua Hagen. "Introduction: Borders, Identity, and Geopolitics." In *Borderline and Borderlands: Political Oddities at the Edge of the Nation-State*, edited by Alexander C. Diener and Joshua Hagen, 1-14. United Kingdom: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2010.
- Donnan, Hastings and Thomas M. Wilson. *Borders: Frontiers of Identity, Nation and State*. Oxford: Berg, 1999.
- Eilenberg, Michael. *At the Edges of the State: Dynamics of State Formation in the Indonesian Borderlands*. Leiden: KITLV Press, 2012.
- Gellner, E. *Nations and Nationalism*. Oxford: Blackwell, 1983.
- Giddens, Anthony. *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press, 1990.
- Giddens, Anthony. *Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives*. New York: Rotledge, 2003.
- Ishikawa, Noboru. *Between Frontiers: Nation and Identity in a Southeast Asian Borderland*. Singapore: National University of Singapore Press, 2010.

- Jones, Matthews. *Conflict and confrontation in South East Asia, 1961-1965..* Cambridge: Cambridge University Press, 2002
- Miller, D. 1995. *On Nationality* . Oxford, Clarendon Press
- Munandar, Aris. “Memahami Identitas Sosial Komunitas Lokal di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia.” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. P2E-LIPI. XIX(1), (2011): 25-39.
- Obidzinski, K., Agus Andrianto, Chandra Wijaya. *Penyelundupan Kayu di Indonesia*. Bogor: Center for International Forestry Research, 2006.
- Skeldon, Ronald. 1999. “Migration in Asia after the economic crisis”, *Asia Pacific Population Journal* 14 (1999): 3-24.
- Snow, David.. “Collective Identity and Expressive Forms”. *Center for the Study of Democracy*, UC Irvine, 2001. <http://escholarship.org/uc/item>.
- Smith, A.D. *National Identity*. London: Penguin, 1991.
- Smith, J., et.al. “Illegal logging, collusive corruption and fragmented governments in Kalimantan, Indonesia”. *International Forestry Review* 5(3), (2003): 293-302.
- Subritzky, John. *Confronting Sukarno*. New York: St. Martin’s Press Inc., 2000.
- Wilson, Thomas M. and Hastings Donnan. “Nation, state and identity at international borders.” In *Borders Identities: Nation and State at International Frontiers*, edited by Thomas Wilson and Hasting Donnan, 1-30. New York: Cambridge University Press, 1998.